

Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia - 2018 (2018 ID-IGF National Dialogue)

Terms of Reference

LATAR BELAKANG

Internet bermula sebagai proyek pemerintah. Di akhir periode 1960-an, pemerintah Amerika Serikat mensponsori pengembangan Proyek Penelitian Tingkat Lanjut Jaringan Lembaga Pertahanan [DARPA Net] sebagai sumber daya komunikasi yang tangguh. Dengan ditemukannya Protokol Kontrol Transmisi/Protokol Internet [TCP/IP] pada pertengahan periode 1970-an, jaringan ini berkembang menjadi yang dikenal sekarang sebagai Internet. Awalnya internet bersifat sangat sentralistis mengingat pengembangannya yang dilatarbelakangi kepentingan pemerintah

Pendekatan yang bersifat desentralistis terhadap tata kelola Internet kemudian berubah, menyusul kesadaran pemerintah dan sektor bisnis terhadap pentingnya jaringan global. Perkembangan yang bersifat desentralistis ini semakin meningkat dan menghasilkan beragam inovasi yang dapat dirasakan hingga saat ini. Internet pun baik secara global dan regional telah masuk ke ruang – ruang kehidupan dan menjadi dukungan yang tidak bisa dipisahkan dari sendi – sendi kegiatan sehari – hari.

Perkembangan yang ada dan sifatnya yang desentralistis, menjadikan internet tidak hanya milik pihak – pihak yang melakukan pengembangan. Internet yang telah dinikmati, berubah menjadi milik mereka yang menggunakannya. Beragam lapisan serta elemen masyarakat terlibat dalam penggunaannya untuk memenuhi kebutuhannya masing – masing, sehingga isu pengaturan dan pengelolaan internet menjadi isu vital dalam pengembangan internet, bagi dari segi regulasi maupun teknis. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah apabila isu tata kelola internet menjadi isu strategis bersama.

APA ITU TATA KELOLA INTERNET?

“Pembangunan dan penerapan prinsip - prinsip, norma - norma, aturan - aturan, prosedur - prosedur pembuatan keputusan, dan program-program yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet secara bersama-sama, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing.”

(Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Masyarakat

SEJARAH TATA KELOLA INTERNET DI INDONESIA

Pada tanggal 1 November 2012, Indonesia telah mendeklarasikan Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum / ID-IGF) yang mengakui dengan jelas pentingnya kerjasama antara beragam pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Internet di Indonesia. Deklarasi yang ditandatangani oleh lebih dari 20 (dua puluh) pemangku kepentingan ini merupakan kali pertama Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia dilakukan. ID-IGF kemudian menggelar perhelatan *Global Internet Governance Forum (IGF) VIII* yang diadakan di Bali pada 22-25 Oktober 2013.

Penyelenggaraan Global IGF 2013 di Bali itu adalah pertama kalinya perhelatan tata kelola Internet yang diampu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut diselenggarakan dalam konsep **pemangku** kepentingan majemuk (*multi-stakeholder*) dan diklaim berbagai pihak sebagai penyelenggaraan IGF terbaik sepanjang masa. Indonesia pun memberikan contoh konkrit kepada dunia tentang bagaimana prinsip multi-stakeholder dijalankan baik dari segi persiapan, pendanaan,

penyelenggaraan hingga audit keuangannya yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan profesional.

Berangkat dari pemahaman dan pengalaman yang sudah dijalani, Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), sebuah gugus tugas yang dibuat secara ad-hoc sejak tahun 2012, merasa sangatlah penting mengikutsertakan lebih banyak pihak yang beragam demi penyelenggaraan Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik. Atas dasar itulah, ID-IGF telah pula menyelenggarakan Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia ke-2 pada tanggal 20 Agustus 2014, ke-3 pada 15 November 2016 dan ke -4 pada 28 Oktober 2017.

Adapun untuk Dialog Nasional yang ke-5, rencananya akan diselenggarakan pada 01 November 2018, akan bertemakan **“Internet yang dapat dipercaya; Kebebasan, keamanan dan kedaulatan”**.

TATA KELOLA INTERNET SEBAGAI ISU STRATEGIS INDONESIA

Pemerintah Indonesia mempunyai visi pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan memfokuskan pengembangan ekonomi digital berbasis lokal yakni UMKM dan bisnis rintisan. Targetnya tercipta 1000 digital start-up dengan valuasi bisnis 10 miliar dolar AS, pertumbuhan e-commerce 50 persen per tahun dan transaksi 130 miliar dolar AS.

Hal ini tentu sesuai dengan riset McKinsey bertajuk “Southeast Asia at the Crossroad: Three Paths to Prosperity” tersebut bahwa gelaran teknologi pengguncang pada kawasan Asia Tenggara berpotensi memberikan sumbangan dampak ekonomi tahunan hingga senilai USD 220 miliar hingga USD 625 miliar per 2030.

Teknologi tersebut disyaratkan pula dilakukan implementasinya pada sektor pembangunan sumber daya alam, infrastruktur, agrikultur dan pangan, konsumen dan retail, manufaktur, jasa keuangan, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan pemerintah. Tentu saja ada teknologi lainnya, jika terkait ekonomi digital, semisal mobile payments, e-commerce, online gaming, dan online advertising.

Berdasarkan “Global Information Technology Report” yang dilansir oleh World Economic Forum pada April 2015, posisi Indonesia dibandingkan negara lain dapat meraup sebesar mungkin potensi keuntungan yang dikandung dalam transformasi digital dan ekonomi digital. Dalam laporan tersebut terdapat pemeringkatan tahunan “The Networked Readiness Index” 2016 yang dilakukan terhadap 139 negara di dunia. Pemeringkatan ini secara umum mengukur tingkat kesiapan ekosistem suatu negara dan masyarakatnya untuk memberdayakan infrastruktur TIK serta konten/layanan digital guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan kehidupan. Berdasarkan data yang ada, untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia (dunia #73) ternyata berada di posisi ke-5 setelah Singapura (dunia #1), Malaysia (dunia #31) dan Thailand (dunia #62).

Secara umum ada 10 indikator yang diukur untuk menentukan peringkat tersebut di atas, yaitu: kebijakan dan politik, bisnis dan inovasi, infrastruktur, daya beli, keahlian sdm, pemanfaatan oleh

MENGAPA TATA KELOLA INTERNET PENTING?

- Pertumbuhan Internet yang begitu pesat membuat berbagai lini kehidupan merasakan dampak dari penggunaan internet.
- Tingginya konsumsi internet menempatkan pengguna dalam posisi penting sebagai pihak yang harus dilindungi dalam pemenuhan hak – hak dasar berdasarkan instrumen Hak Azasi Manusia
- Dibutuhkan kebijakan yang mengakomodasi masing – masing karakteristik para Stakeholders

individu, pemanfaatan oleh sektor bisnis, pemanfaatan oleh pemerintah, dampak ekonomi dan dampak sosial.

Berdasarkan peringkat Indonesia di atas, maka jelas pekerjaan rumah Indonesia masih cukup banyak agar potensi ekonomi Internet tidak berlalu begitu saja, pun hanya dinikmati oleh segelintir negara tetangga. Sehingga, menurut McKinsey, perlu ada sejumlah persiapan negara di kawasan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) ingin turut mendulang manfaat ekonomi Internet seluas-luasnya. Persiapan tersebut diantaranya adalah:

- Membangun infrastruktur backbone (termasuk koneksi fiber optic dan mobile network) yang dapat melayani akses Internet secara universal dengan biaya terjangkau,
- membangun kerangka kebijakan (tata kelola Internet) yang terkait dengan:
 - o privasi online (perlindungan data pribadi dan data sharing)
 - o cybersecurity
 - o pengadopsian TIK oleh pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM).

SIAPAKAH PARA PENGELOLA INTERNET?

- Secara umum, pihak – pihak yang berkepentingan dengan internet adalah pengelola internet (“Pemangku Kepentingan/Stakeholders”).
- Bersifat inklusif, para Stakeholders secara garis besar dikelompokan atas **Pemerintah**, **Komunitas Teknis**, **Sektor Bisnis**, Akademisi, dan **Lembaga Swadaya Masyarakat**.
- Para Stakeholders berkumpul dalam suatu kelompok, yang bersifat memberikan rekomendasi dan masukan terhadap kebijakan – kebijakan terkait internet berdasarkan keahlian dan latar belakang yang dimiliki.

Sehingga Indonesia memerlukan adanya tata kelola Internet Indonesia yang dirumuskan bersama oleh pemangku kepentingan majemuk (*multi-stakeholder*), yaitu dari unsur pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis. Harapannya, dengan semangat dialog yang kolaboratif, egaliter dan inklusif antar para pihak, maka penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan tata kelola Internet di Indonesia akan menjadi lebih baik kedepannya. Tata kelola Internet yang profesional, transparan dan akuntabel

akan dapat mendorong pemaksimalan potensi manfaat dan dampak positif Internet untuk masyarakat Indonesia, serta meminimalisir potensi kerugian dan dampak negatifnya dengan harapan para pemangku kepentingan di Indonesia perlu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang strategi optimal menggarap potensi yang ada untuk melakukan transformasi digital dan ekonomi internet serta mengantisipasi kondisi dan diplomasi kepentingan geo politik (dan konektivitas infrastruktur Internet) global.

PENYELENGGARAAN DIALOG NASIONAL TATA KELOLA INTERNET INDONESIA

Dalam proses , pelaku bisnis telekomunikasi dan Internet akan melihat tata kelola Internet melalui kacamata pembangunan infrastruktur teknis. Akademisi komputer dan bahasa pemrograman, memberi perhatian kepada pengembangan standar dan aplikasi yang berbeda-beda. Pegiat Hak Asasi Manusia dan organisasi masyarakat sipil (*civil society organization – CSO*) memandang tata kelola Internet dari perspektif kebebasan berekspresi, privasi dan hak asasi manusia. Praktisi hukum berkonsentrasi pada yurisdiksi dan penyelesaian sengketa. Pemerintah fokus pada isu-isu yang berkaitan erat pada proses dan perlindungan kepentingan nasional. Sementara itu pelaku bisnis di Internet akan melihat tata kelola Internet dari sudut pandang keamanan transaksi online.

Sebagai negara dengan potensi transformasi digital yang tinggi, pembahasan yang dilakukan oleh para stakeholders mencakup inovasi dan teknologi yang berkembang. . Ada 5 (lima) teknologi (disruptive technology) yang paling potensial menjadi katalis pertumbuhan ekonomi digital dan perubahan sosial di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan hasil riset McKinsey Global Institute yang dirilis pada November 2014.

Kelima teknologi tersebut yaitu: *mobile internet, big data, internet of things (IoT), automation of knowledge* dan *cloud technology*. Kelima teknologi tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal ketika memang diimplementasikan secara harmonis, untuk memberikan efisiensi dan efektifitas proses bisnis yang ada.

Selain itu, isu mengenai Perangkat kognitif tata kelola Internet sebagai serangkaian perangkat untuk mengembangkan kebijakan dan menyusun argumentasi dari diskusi kebijakan-kebijakan tersebut di Indonesia. Perangkat ini selain memiliki sejumlah fungsi praktis bagi mereka yang bergerak dalam tata kelola Internet, juga membantu untuk menelusik tumpukan informasi, dokumen dan kajian tentang tata kelola Internet, dan membantu mengembangkan narasi kebijakan dan pemahaman terhadap pendekatan kebijakan lainnya. Intinya, perangkat ini memperkuat kualitas negosiasi dengan membuka peluang lebih banyak untuk keterbukaan dan solusi yang berbasis pada kompromi.

Perangkat ini juga terkait dengan model tata kelola Internet yang terus bertumbuh, dan saat ini berada pada tahap-tahap awal perkembangannya. Pengalaman dengan model tata kelola sektor lainnya di internasional (seperti tata kelola lingkungan hidup, transportasi udara, pengendalian senjata) menunjukkan, bahwa yang dilakukan kali pertama adalah mengembangkan kerangka kerja untuk dijadikan acuan bersama. Di dalamnya termasuk nilai-nilai, persepsi terhadap hubungan sebab-akibat, model penalaran, terminologi, kosakata yang digunakan, jargon dan singkatan-singkatan. Kerangka kerja acuan ini, karena itu menjadi sangat penting dalam kehidupan politik karena menentukan bagaimana isu-isu tertentu dikemas berikut tindakan yang perlu diambil.

Dalam banyak kasus, kerangka kerja acuan ini dipengaruhi oleh budaya profesi tertentu (pola pengetahuan dan perilaku yang dianut oleh anggota profesi yang sama). Kerangka kerja ini biasanya juga membantu memfasilitasi komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, bisa digunakan untuk melindungi profesi tertentu itu, dan mencegah campur tangan pihak luar yang tidak berkepentingan dan/atau dapat merugikan kepentingan bersama. Model tata kelola Internet faktanya terbilang kompleks karena melibatkan begitu banyak isu, pelaku, mekanisme, prosedur juga instrumen. Sifat dari tata kelola Internet, diwarnai oleh sejumlah kemungkinan yang bisa mempercepat proses perubahan, dan sederet tantangan yang menentukan tujuan pengembangan kebijakan untuk alasan tertentu. Dalam banyak kasus, sebuah problematika menjadi gejala atas sejumlah problematika lainnya di Indonesia.

BAGAIMANA CARA BERKONTRIBUSI?

- Tidak ada jalur khusus untuk berkontribusi dalam pengelolaan tata kelola internet. Segala macam kegiatan pemberian masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan terhadap tata kelola internet merupakan kontribusi anda.
- Hadir dan menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi tata kelola internet yang bersifat internasional, regional, maupun nasional dapat menjadi salah satu alternatifnya.
- Kami pun turut mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan berkontribusi pada **"DIALOG NASIONAL TATA KELOLA INTERNET - 2018"**.

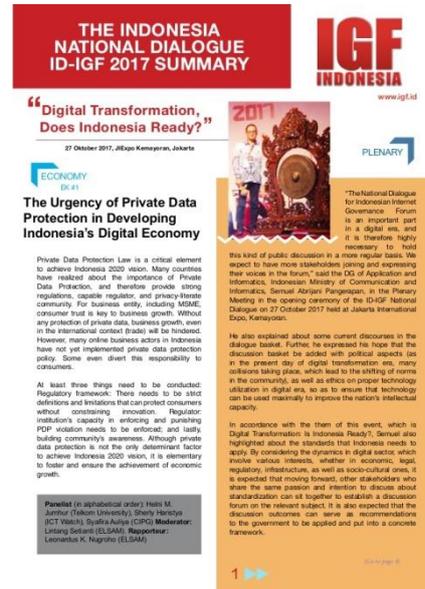
TEMA DIALOG NASIONAL TATA KELOLA INTERNET INDONESIA

Internet yang dapat dipercaya; Kebebasan, Keamanan dan Kedaulatan.

BENTUK KEGIATAN

Dialog Nasional Tata Kelola Internet merupakan forum yang membahas berbagai topik/materi seperti tersebut diatas dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten dibidangnya. Pembahasan topik/materi dimaksud akan berbentuk diskusi dan dialog untuk menghasilkan gambaran dan gagasan terkini terkait Tata Kelola Internet Indonesia.

Adapun hasil Dialog Nasional ini selain sebagai rekomendasi penting para pemangku kepentingan terkait, juga akan menjadi rujukan posisi Indonesia pada Global Internet Governance Forum (IGF) 2018 di Paris, Perancis, November 2018



PESERTA

1. Terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berminat untuk terlibat dalam mewujudkan Tata Kelola Internet transparan, akuntabel dan professional.
2. Setiap peserta dikehendaki untuk terlibat dalam membahas, memberikan masukan dan usulan untuk setiap topik/materi yang terbagi dalam beberapa sesi workshop/diskusi
3. Target minimum 250 (dua ratus lima puluh) peserta dan maximum 500 (lima ratus peserta).

MATERI DISKUSI

INFRASTRUKTUR (IS)	
(TB)	
IS-1	[dalam konfirmasi]
IS-2	[dalam konfirmasi]
IS-3	[dalam konfirmasi]
EKONOMI (EK)	
DIGITAL EXPANSION	
EK-1	[dalam konfirmasi]
EK-2	[dalam konfirmasi]
EK-3	[dalam konfirmasi]
HUKUM (HK)	
RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI & “HAK UNTUK DILUPAKAN”	
HK-1	[dalam konfirmasi]
HK-2	[dalam konfirmasi]
HK-3	[dalam konfirmasi]
SOSIAL BUDAYA (SB)	
HOAX	

SB-1 [dalam konfirmasi]

SB-2 [dalam konfirmasi]

SB-3 [dalam konfirmasi]

YOUTH ID IGF & Open Mike

Diskusi "Hate speech or freedom of speech"

AGENDA (TENTATIF)

Waktu/Ruangan	Ballroom	Ruang 1	Ruang 2	Ruang 3
08.00 - 08.30	Pendaftaran			
08.30 - 09.00	Sesi Pembukaan			
10.00 - 10.15	Rehat Kopi			
10.15 - 12.00	HK-1	SB-1	IS-1	EK-1
12.00 - 13.00	ISHOMA			
13.00 - 14.00	EK-2	HK-2	SB-2	IS-2
14.00-14.30	Penutupan			

PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : **Kamis 1 November 2018**
 Waktu : **08:00 - 14.30**
 Lokasi : **Perpustakaan Nasional RI**

LAMPIRAN-1 DEKLARASI ID-IGF

Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku-Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Kami, para pelaku Multi Pemangku-Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku-Kepentingan.

Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet ;
2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja ;

3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain ;
4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.

Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku-Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain

Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah :

1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945 ;
2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan ;
3. Tanggung jawab dari Negara ;
4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal ;
5. Sifat global dari Internet ;
6. Integritas dari Internet ;
7. Manajemen yang terdesentralisasi ;
8. Arsitektur yang terbuka ;
9. Netralitas jaringan ;
10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta, 1 November 2012

DEKLARASI TATA KELOLA INTERNET INDONESIA

IGF INTERNET GOVERNANCE INDONESIA FORUM

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku - Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Kami, para pelaku Multi Pemangku-Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku-Kepentingan.

Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet;
2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja;
3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain;
4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.

Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku-Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain

Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah:

1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945;
2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan;
3. Tanggung jawab dari Negara;
4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal;
5. Sifat global dari Internet;
6. Integritas dari Internet;
7. Manajemen yang terdesentralisasi;
8. Arsitektur yang terbuka;
9. Netralitas jaringan;
10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta - 1 November, 2012

DEKLARASI TATA KELOLA INTERNET INDONESIA

IGF INTERNET GOVERNANCE INDONESIA FORUM

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku - Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Kami, para pelaku Multi Pemangku-Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku-Kepentingan.

Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet;
2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja;
3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain;
4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.

Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku-Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain

Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah:

1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945;
2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan;
3. Tanggung jawab dari Negara;
4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal;
5. Sifat global dari Internet;
6. Integritas dari Internet;
7. Manajemen yang terdesentralisasi;
8. Arsitektur yang terbuka;
9. Netralitas jaringan;
10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta - 1 November, 2012